

Jurnal Inen Paer

Pusat Studi Kebudayaan Universitas Nahdlatul Ulama NTB

Vol. 1, No, 1, Juni 2024

<https://unu-ntb.e-journal.id/jip>

UPAYA ADVOKASI TERADAP PASANG SURUT RELASI ANTARAGAMA DI KOTA MAKASSAR

Iqtamar Muhammad

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

iqtamarmuhammad99@gmail.com

Abstrak

Pasang surut yang terjadi bermula sejak Oktober 1967 di mana terdapat beberapa pemuda Muslim merusak sekitar 20 gereja dan sekolah Kristen Katolik dan Protestan, serta membakar puluhan Injil (Alkitab). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pasang surut relasi antar agama, dan untuk mengetahui apa saja upaya advokasi yang dilakukan oleh antar agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beragam bentuk inisiatif advokasi dan dialog antaragama yang telah diimplementasikan para pegiat perdamaian dan tokoh agama di Kota Makassar, memiliki pendekatan yang berbeda-beda, di antaranya ialah penyelenggaraan dan pertemuan para tokoh antaragama dan keyakinan, seminar dan diskusi akademik di kampus-kampus, paguyuban pemuda lintas agama, hingga mediasi antarumat beragama dengan pihak pemerintah setempat. Kemudian, kunjungan ke tempat-tempat ibadah, seperti masjid, gereja, vihara, dan lain-lain. Bentuk-bentuk advokasi dan dialog antaragama yang berupa kemah dan kampanye perdamaian, menjalin kerja sama dengan pemerintah setempat untuk memperingati hari perdamaian sedunia, juga terdapat upaya dalam membangun narasi melalui dunia *online* dengan menciptakan konten wacana mengenai isu perdamaian dan kerukunan.

Kata Kunci: Advokasi, Relasi Antaragama, Kota Makassar

A. PENDAHULUAN

Kelompok masyarakat di Indonesia telah banyak melakukan diskusi serta bahasan mengenai penataan korelasi antaragama. Pada ajaran Islam, contohnya, dikenal *Fiqh* yang mengatur hubungan antaragama yang timbul dalam merespons realitas sosial bangsa yang mejemuk. Bahkan, bagi kalangan pemikir Islam (progresif), isu hubungan antaragama menjadi salah satu isu penting yang dihadapi oleh umat beragama pada era disruptif ini. Sebab, kerumitan yang timbul saat ini, mengakibatkan semacam kekhawatiran dari kelompok yang lebih banyak mendominasi (Islam) tentang keberadaan dari kepercayaan lainnya. Kelompok penganut Islam bahkan kadang-kadang terlibat pada pandangan yang mendudukkan ‘kelompok lain’ menjadi ancaman.¹

Meningkatnya ketegangan (baca: konflik) di antara kelompok masyarakat, khususnya kelompok atau pemeluk kepercayaan, mesti dipandang secara jernih agar masyarakat tidak terjebak pada perilaku saling menyalahkan. Ketegangan yang tak jarang terjadi dipicu, salah satunya ialah, sangat mengentalnya semangat kelompok agama-agama buat menampilkan identitasnya. Kontestasi identitas yang terjadi selama ini bukanlah suatu *problem* baru. Sebab, pada prinsipnya, seluruh kepercayaan memiliki ‘doktrin’ yang mengarah pada keharusan akan pengentalan identitas.² Pemeluk kepercayaan memiliki perasaan bangga sebagai pemeluk dan mempunyai sebuah kepercayaan.

Rasa bangga tadi dibuktikan melalui praktik-praktik ibadah serta penggunaan simbol-simbol yang sangat lekat dengan kepercayaan yang dia yakini kebenarannya. Ini lalu melahirkan kontestasi di antara mereka. Kontestasi identitas ini pun tidak sporadis, justru hal tersebut memancing reaksi keras dari kelompok/pemeluk agama lain. Awal mula pasang surut relasi antaragama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terjadi pada 1 Oktober 1967. Beberapa pemuda Muslim merusak sekitar 20 gereja dan sekolah Kristen Katolik dan Protestan, serta membakar puluhan Injil (Alkitab). Kejahatan tersebut dianggap dipicu oleh seorang

¹ Irwan Abdullah, dalam Hasse Jubba, *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual Di Indonesia* (The Phinisi Press, 2019), xii.

² Hasse Jubba, *Kontestasi...*, 1.

guru penganut Protestan yang membuat pernyataan yang menghina agama serta umat Islam.

Setelah peristiwa di Makassar tersebut, pada 17 Oktober 1967, Komite Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) mengirim surat terbuka kepada pejabat, yakni Presiden Soeharto, agar menghentikan konflik tersebut dengan cara membentuk sebuah lembaga konsultasi untuk mendiskusikan terkait dengan toleransi antarumat beragama. Beberapa minggu setelah insiden tersebut, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengadakan kongres ke-6 di Makassar. Presiden Soeharto kemudian menegaskan, pertemuan tersebut dapat dijalankan demi mewujudkan kondisi keamanan di Makassar yang mudah terkendali. Pada pertemuan tersebut, ditegaskan bahwa umat Kristen mesti berupaya dalam menjaga praktik keagamaan yang damai di seluruh wilayah Indonesia, meski begitu, PGI juga tetap dengan tegas mengatakan bahwa mereka mesti menyebarkan kitab Injil dan mesti menerima segala risiko dari hal tersebut.³

Meski begitu, upaya advokasi terhadap pasang surut relasi antaragama di Kota Makassar menjadi penting demi mewujudkan toleransi antarumat beragama, serta menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai kesatuan dalam norma-norma dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan baik. Tidak hanya kepada intern dalam satu agama, tetapi juga kepada umat dari berbagai ajaran agama, termasuk pula bagi yang menganut kepercayaan atau budaya lokal (*indigenous people*). Dengan demikian, timbullah prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap kegiatan masyarakat.

B. METODE

Tulisan ini memiliki jenis penelitian, yakni deskriptif-analitis, yang berupaya dalam mendeskripsikan data penelitian dan dianalisis hingga menemukan suatu kesimpulan khusus pada data yang dikaji. Kemudian, tulisan ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dalam mengkaji proses dari upaya advokasi dalam relasi antaragama di Kota Makassar. Data penelitian diperoleh melalui metode dokumentasi, yakni berupa data atau dokumen yang disajikan secara *online*

³ Rahman Mantu, "Lembaga Interfaith Di Indonesia (Studi Kritis Pendekatan Formalistik Negara Terhadap Kerukunan Antarumat Beragama)," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 1, no. 1 (2016): 55.

dalam membahas terkait upaya advokasi yang dilakukan terhadap pasang surut dalam relasi antaragama di Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah pendekatan sejarah, sosial, budaya, politik, dan keagamaan. Lalu, tulisan ini juga menggunakan metode analisis data berupa analisis isi (*content analysis*), yakni dengan melihat sumber yang diperoleh berdasarkan pada isi dan intisarinnya, serta tulisan ini menggunakan analisis data berupa deduktif-induktif, yakni dengan berdasarkan pada bagian awal dan akhir dalam sumber data yang dikaji untuk dapat diberi kesimpulan.

Adapun teori yang digunakan dalam tulisan ini ialah teori advokasi dari John Hopkins University (JHU) melalui Center for Communication Program (CCP). Pada teori tersebut, dikatakan bahwa advokasi merupakan upaya dalam memengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi atau penetapan dari sebuah gerakan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang untuk mengendalikan perilaku lembaga, masyarakat, dan individu. Teori advokasi model ini kemudian memiliki beberapa komponen dalam mengaplikasikan komunikasi yang efektif untuk advokasi, yakni analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan.⁴

1. Analisis merupakan langkah pertama untuk melakukan advokasi secara efektif. Analisis berupaya untuk mencari informasi dengan saksama terhadap konflik yang ada dan pemahaman mengenai perseteruan tersebut dengan melihat masyarakat yang terlibat, organisasi, kebijakan dan keberadaannya, serta jalur yang bisa memengaruhi pengambilan keputusan.
2. Strategi merupakan langkah kedua dari advokasi yang dibangun berdasarkan pada perencanaan, analisis yang terarah, dan berfokus pada tujuan khusus. Strategi juga dapat menentukan sasaran dan tujuan yang jelas dalam mencapainya.
3. Mobilisasi merupakan langkah ketiga dengan memperkuat advokasi dengan berbagai kegiatan, peristiwa, materi, dan pesan pendukung dengan berdasarkan pada sumber yang ada, serta sesuai dengan tujuan dari sasaran kelompok. Mobilisasi mesti memberi dampak positif secara maksimal bagi pembuat kebijakan dan membutuhkan partisipasi dari setiap anggota.

⁴ John Hopkins, “‘A’ Frame for Advocacy,” 1999.

4. Aksi merupakan langkah keempat yang berupaya dalam mempertahankan kegiatan dengan pengulangan pesan yang menggunakan alat bantu yang kredibel dengan tujuan mendapat perhatian dari isu yang ada.
5. Evaluasi merupakan langkah kelima dalam advokasi. Evaluasi berfungsi untuk *memonitoring* secara rutin dan objektif terhadap hasil sosialisasi yang dicapai dan apa yang masih mesti dilakukan.
6. Kesenambungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan dan berlangsung secara terus-menerus dengan mempertahankan fungsi, memperjelas tujuan jangka panjang, memantau perubahan yang terjadi, dan menyesuaikan dengan data yang ada. Terpenuhinya keenam komponen tersebut, diharapkan kegiatan advokasi yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Identifikasi Pasang Surut Relasi Antaragama di Kota Makassar

Pasca reformasi, hubungan terhadap berbagai keragaman di Makassar tidak mampu dikatakan baik-baik saja. Khususnya, dalam hal ini, hubungan antaumat beragama serta perlakuan terhadap kelompok-kelompok minoritas, seperti *Ahmadiyah* dan *Syi'ah*. Pada tahun 2008, misalnya, Syamsurijal ditugaskan oleh Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR)⁶ dan Wahid Institute⁷ untuk memantau Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan dari delapan indikator yang dipantau, ternyata yang relatif menonjol ialah perkara-perkara penyesatan serta permasalahan rumah ibadah. Masalah-masalah tersebut, terutama timbul di Kota Makassar. Pada tahun-tahun selanjutnya, situasi kerukunan dan kebebasan beragama belum benar-benar cerah, apalagi dengan semakin berkembangnya kelompok-kelompok Islam Transnasional dan juga

⁵ Danang Wiryawan, Rini Riyantini, dan Lusya Handayani, "Komunikasi Advokasi Klarifikasi Fakta Pemberitaan Hoaks Pada Instagram @JALAHOAKS," *Jurnal Pustaka Komunikasi* 4, no. 2 (2021): 201–2.

⁶ Riya Anjasari, "LAPAR Sulsel's Action In Building Political Literacy In Makassar City Communities," *Asian Journal of Social and Humanities* 1, no. 11 (2023): 765–776, <https://ajosh.org/index.php/jsh/article/view/98/130>. Lebih lengkap terkait LAPAR Sulsel, bisa mengakses situs <https://laparsulsel.org>.

⁷ Syifa Ainun Lutfiana et al., "The Wahid Institute Dan Pluralisme Di Indonesia (2004-2008)," *Estoria: Journal of Social Science and Humanities* 2, no. 1 (2021): 209–225, <https://doi.org/10.30998/je.v2i1.600>. Lebih lengkap terkait Wahid Institute, dapat mengunjungi situs <https://www.wahidinstitute.org>.

kelompok Islam yang puritan. Ahmadiyah dan Syi'ah beberapa kali dipersekusi.

Bahkan, sejak terbitnya SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah (2008), kelompok keagamaan ini telah didatangi beberapa kali oleh organisasi Islam lainnya. Ahmadiyah diminta untuk menutup masjid dan kantor tempat mereka melakukan aktivitas. Masjid Ahmadiyah pada akhirnya disegel oleh massa yang datang untuk berunjuk rasa di sekitar kantor dan masjid dari Ahmadiyah. Situasi di Kota Makassar sebagaimana yang diutarakan oleh Syamsurijal, menempatkannya sebagai kota yang berada dalam sepuluh terbawah dalam kategori kota toleransi. Setidaknya, begitulah hasil dari Survei Indeks Kota Toleran yang dirilis oleh Setara Institute pada tahun 2018.⁸

Informasi terkait kebebasan dan kerukunan dalam beragama di Makassar menjadi sedikit muram. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada secercah harapan untuk membangun kerukunan yang lebih baik antara berbagai keragaman yang ada di Makassar. Harapan tersebut terletak pada timbulnya *potential offender* untuk membangun kerukunan beragama. Mereka ialah organisasi-organisasi keagamaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam komunitas yang merawat kerukunan beragama. Selain adanya kelompok-kelompok kerukunan beragama tersebut, ada kabar menggembirkan yang lain, yakni hasil survei yang diadakan Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2019, menempatkan indeks kerukunan di Makassar di atas rata-rata indeks kerukunan Nasional.⁹

Sebelumnya, ada penelitian lain yang juga dilakukan oleh Balai Litbang Kementerian Agama Makassar yang menyebutkan, meski secara angka, indeks kerukunan beragama di Makassar terhitung tinggi. Namun, model kerukunan itu belum sampai pada tataran, meminjam istilah Diana L. Eck; *the energetic engagement with diversity*. Perilaku toleransi yang disebut oleh Diana L. Eck demikian menunjukkan satu sikap penuh semangat dan perilaku aktif dalam perjumpaan di tengah keragaman. Namun, apapun itu, tumbuhnya sikap toleransi

⁸ Syamsurijal, dalam Ridwan Al-Makassary dan Yusuf Daud, eds., *Menyalakan "Lilin": Dialog Antar Agama* (Yogyakarta: Litera, 2020), 151–52.

⁹ Syamsurijal, dalam Ridwan Al-Makassary dan Yusuf Daud, eds., *Menyalakan "Lilin"...*, 152.

patut disyukuri.¹⁰

Seiring dengan berkembangnya zaman, tumbuhlah komunitas yang merawat kerukunan beragama di Makassar. Pada beberapa tahun terakhir, selain yang resmi dibentuk oleh pemerintah, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kebangsaan, juga timbul forum-forum yang diinisiasi oleh anak muda dan para aktivis. Salah satunya ialah Forum Dialog Antar Umat Beragama (Forlog). Forum ini muncul tidak lama setelah Reformasi. Beberapa aktivis yang menopang Forum Dialog beranjak senja. Sementara, yang lainnya tersebar ke berbagai tempat, maka muncullah komunitas-komunitas baru yang diinisiasi oleh anak muda. Kini, terdapat komunitas yang bernama Jalin (Jaringan Lintas Iman) Harmoni, Mahabbah Institute¹¹, dan Komunitas Gusdurian¹².

Semakin menguatnya identitas kelompok saat ini, Syamsurijal teringat dengan dua modal sosial yang lazim disebut oleh para sosiolog, seperti Robert Putnam ataupun Kearns (2004), dengan sebutan *Bonding Social Capital* dan *Bridging Social Capital*. *Bonding Social Capital* merupakan hubungan kelompok sosial yang cenderung homogen dengan tujuan untuk memperkuat ikatan sosial dan identitas kelompok bersangkutan. Sementara, *Bridging Social Capital* ialah relasi sosial yang cenderung lebih heterogen, proses ini bertujuan untuk membangun ikatan sosial lintas etnis, agama, dan kelompok yang berbeda.¹³

Padahal, komunitas semacam Jalin Harmoni, Gusdurian, ataupun Mahabbah, lebih banyak melakukan kegiatan yang terprogram. Kegiatan-kegiatan

¹⁰ Syamsurijal, dalam Ridwan Al-Makassary dan Yusuf Daud, eds., *Menyalakan "Lilin"...*, 152.

¹¹ Indo Santalia dan Irwanto, "Peace Building: Studi Kasus Kegiatan Mahabbah Institute For Peace And Goodness Di Kota Makassar," *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial Dan Agama* 5, no. 2 (2018): 235–94, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adyan/article/view/10021>; Muhammad Arief Syam, "IMPLEMENTATION OF ARTICLES OF HARMONY BETWEEN RELIGIOUS PEOPLE AT MAHABBAH INSTITUTE FOR PEACE AND GOODNESS," *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 11, no. 2 (2022): 228–45, <https://doi.org/10.24252/jicsa.v11i2.33146>.

¹² Laessach M. Pakatuwo, Muhaemin Muhaemin, dan La Ode Ismail, "Merawat Pluralisme Dan Pendidikan Demokrasi Di Indonesia: Kontribusi Komunitas Gusdurian Di Kota Makassar," *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2, no. 2 (October 31, 2023): 98–119, <https://doi.org/10.61169/el-fata.v2i2.63>. Lebih lengkap terkait Komunitas Gusdurian, dapat dilihat di media sosial Instagram @gusdurian.id dan untuk wilayah Kota Makassar di Instagram @gusdurian_makassar.

¹³ Syamsurijal, dalam Ridwan Al-Makassary dan Yusuf Daud, eds., *Menyalakan "Lilin"...*, 152–53.

yang dibangun didesain sedemikian rupa untuk mengelola kerukunan tersebut. Dalam banyak hal, komunitas ini lebih banyak merespons kasus-kasus intoleransi atau persekusi terhadap kelompok tertentu. Konsolidasi yang terbangun dirancang untuk menghadapi kasus. Selain itu, kendati dari beragam kelompok, suku, dan agama, pada dasarnya, yang tergabung dalam komunitas semacam Jalin Harmoni ialah mereka yang memiliki perspektif toleransi yang sama. Mereka merupakan orang-orang dengan ideologi toleransi yang terbilang sudah bagus. Oleh karena itu, komunitas ini merupakan para aktivis yang sedang membuat program tentang toleransi dan bukan wadah untuk mendialogkan keragaman itu sendiri.¹⁴

Dinamika kehidupan masyarakat Kota Makassar di tengah pluralitas agama dan keragaman paham keagamaan yang terus bergerak, perlu mendapat perhatian agar tetap berada pada jalur dan alur yang tepat, tanpa menimbulkan masalah bagi percepatan kemajuan bangsa. Pemicu konflik yang dapat merusak stabilitas masyarakat, terlihat dalam beberapa kategori, di antaranya; perbedaan agama/keberagaman, keragaman etnik, keragaman bahasa, keragaman tradisi, perbedaan jenis kelamin dan gender, serta perbedaan kemampuan yang diperoleh bagi setiap individu. Penguatan keagamaan sebagai program agar masyarakat dengan beragam agama, suku, dan bangsa, tidak memiliki rasa yang hanya hidup berkelompok, tetapi juga mampu untuk hidup berdampingan dan saling menghargai satu sama lain.¹⁵

2. Upaya Advokasi dalam Membangun Relasi Antaragama di Kota Makassar

Terdapat beragam bentuk inisiatif advokasi dan dialog antaragama yang telah diimplementasikan para pegiat perdamaian dan tokoh agama di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, memiliki pendekatan yang berbeda-beda, di antaranya ialah pendekatan formal dengan basis antarorganisasi dan instansi, seperti penyelenggaraan dan pertemuan para tokoh antaragama dan keyakinan, seminar dan

¹⁴ Syamsurijal, dalam Ridwan Al-Makassary dan Yusuf Daud, eds., *Menyalakan "Lilin"...*, 153-54.

¹⁵ Nur Rahmi Rahim, "Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama Di Kota Makassar" (UIN Alauddin Makassar, 2023), 93-4, <https://repository.uin-alauddin.ac.id/25153/>.

diskusi akademik di kampus-kampus, paguyuban pemuda lintas agama, hingga mediasi antarumat beragama dengan pihak pemerintah setempat. Selain kegiatan formal, praktik-praktik dialog antaragama yang dilakukan para pegiat perdamaian dan kerukunan antarumat beragama di Sulawesi Selatan, terutama pada Kota Makassar, juga dalam bentuk kegiatan yang bersifat informal, di antaranya, kunjungan ke tempat-tempat ibadah, seperti masjid, gereja, vihara, dan lain-lain.

Bentuk-bentuk advokasi dan dialog antaragama yang berupa kemah dan kampanye perdamaian, menjalin kerja sama dengan pemerintah setempat untuk memeringati hari perdamaian sedunia, juga terdapat upaya dalam membangun narasi melalui dunia *online* dengan menciptakan konten wacana mengenai isu perdamaian dan kerukunan. Pada level ini, tentu saja sasarannya merupakan para generasi muda, terutama kaum milenial dan generasi 'z' yang dalam sehari-harinya tidak lepas dari dunia *gadget*. Amanah Nurish menduga, masyarakat Sulawesi Selatan, utamanya masyarakat kota Makassar, telah membuktikan bahwa kesadaran akan berdialog dan beradvokasi dalam membangun literasi dapat menjadi sangat progresif, meskipun di sisi lain, intensitas konflik antaragama kerap terjadi.¹⁶

Pembinaan agama merupakan tanggung jawab dari Departemen Agama sebagai institusi negara yang secara historis dan yuridis memiliki wewenang di bidang tersebut. Departemen Agama sendiri, dalam melaksanakan arah pembinaan kehidupan beragama di Indonesia berbeda dengan pelaksanaan masa kolonial yang bertujuan sempit semata-mata memperkuat kekuasaan kolonial. Kehadiran dari Departemen Agama dalam struktur organisasi pemerintahan Republik Indonesia untuk menunaikan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di sektor agama, sekaligus melaksanakan tugas-tugas lintas sektoral bersama instansi pemerintah dan seluruh masyarakat dalam rangka membangun seluruh manusia Indonesia secara utuh menuju masyarakat yang sejahtera, baik lahir maupun batin.

Berdasarkan dari hal tersebut, salah satu tugas Departemen Agama ialah membangun kerukunan hidup antar dan intern umat beragama. Hal demikian perlu ditangani, karena pengikut agama mempunyai kecenderungan untuk menyebarkan

¹⁶ Amanah Nurish, dalam Ridwan Al-Makassary dan Yusuf Daud, eds., *Menyalakan "Lilin"...*, 146.

kebenaran yang diyakini kepada umat manusia. Jika kecenderungan ini tidak diatur, maka akan menjadikan masyarakat beragama saling berebut pengaruh yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik antaragama.¹⁷

Tugas keagamaan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Departemen Agama di tengah-tengah masyarakat cukup banyak. Hal tersebut merupakan suatu pertanda keseriusan pemerintah terhadap umat beragama, termasuk di Kota Makassar. Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai pedoman yang berkaitan dengan masalah keagamaan, juga memberi fasilitas bagi kalangan umat beragama untuk berdialog dan bekerja sama. Demikian juga yang dikemukakan oleh Al-Qadri sebagai berikut:

Menurut saya, perhatian pemerintah terhadap toleransi antarumat beragama di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar saya melihat perhatian pemerintah Kota Makassar saat ini sangat bagus, karena pemerintah dan para pimpinan agama saling mengunjungi tempat-tempat beribadah lintas agama. Hal itu dapat terjadi karena dukungan masyarakat Makassar, seperti Pemerintah Daerah, aparat keamanan serta organisasi-organisasi keagamaan, seperti forum-forum antarumat beragama. Selain itu, agama saling terbuka dalam mendiskusikan berbagai isu yang terjadi di kalangan umat yang juga saling membantu, baik secara moril maupun material.¹⁸

Perlu disadari bahwa urusan keagamaan merupakan urusan bersama dan urusan setiap umat beragama yang mesti mengatur diri mereka sendiri. Namun, yang lebih penting lagi ialah urusan pemerintah untuk berupaya dalam mengatur ketertiban serta masalah-masalah lain agar masyarakat dapat hidup tenang, damai, dan sejahtera secara lahir dan batin, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Zakur sebagai berikut:

Menurut saya, perhatian pemerintah Kota Makassar terhadap urusan umat beragama sudah baik, karena tidak ada lagi pendiskriminasian terhadap umat beragama tertentu dan toleransi antarumat beragama juga sudah baik, tetapi ada beberapa yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah, misalnya izin membuat dan mendirikan tempat ibadah yang sampai sekarang sangat dipersulit, dan pemerintah juga

¹⁷ Said Agil Husin Al-Munawwar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, 3rd ed. (Ciputat: Ciputat Press, 2005), xii.

¹⁸ Al-Qadri, dalam Darwis Muhdina, "Peran Pemerintah Terhadap Kerukunan Umat Beragama Di Kota Makassar," *Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2018): 8.

seharusnya membentuk tim atau kelompok kerukunan umat beragama, sehingga dapat meminimalisasi kerusuhan atau masalah antarumat beragama.¹⁹

Membangun advokasi dalam kehidupan umat beragama secara harmonis memang bukan merupakan hal yang mudah dan ringan. Hal demikian mesti dijalankan dengan hati-hati, mengingat agama lebih melibatkan pada aspek emosi daripada rasio, lebih menegaskan klaim kebenaran daripada mencari kebenaran. Meskipun begitu, sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan di tingkat lapangan, terutama yang berkenaan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perayaan hari-hari besar keagamaan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, maka perlu untuk kembali kepada aturan atau norma yang telah berlaku.

Beberapa hasil penelitian dari Puslitbang Kehidupan Keagamaan merupakan hasil penelitian yang memiliki nilai guna yang tinggi, sehingga, perlu disosialisasikan secara lebih luas. Selain sosialisasi dalam bentuk seminar hasil penelitian yang telah menjadi tradisi dalam Puslitbang Kehidupan Keagamaan, hasil penelitian tersebut juga telah disosialisasikan pada forum yang bertaraf nasional setidaknya tiga kali. Pertama, sosialisasi pada forum Kongres Pemuka Agama yang dilaksanakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Departemen Agama pada tanggal 7-9 Desember 2009 di Jakarta. Kedua, sosialisasi pada seminar dalam rangka memperingati Hari Amal Bhakti Departemen Agama yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2009. Ketiga, merupakan sosialisasi pada forum rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan oleh Kementrian Dalam Negeri pada tanggal 25-27 Mei 2010 yang bertempat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.²⁰ Fajar Ramadhan mengatakan,

Melihat fenomena yang ada di Makassar, peran pemerintah hampir sangat vital, karena terdapat pemikir-pemikir agama yang tidak hanya berasal dari kalangan agama Islam, tetapi juga dari agama lain, seperti Kristen, Buddha, dan Hindu. Pemerintah Kota Makassar juga telah

¹⁹ Zakur, dalam Darwis Muhdina, "Peran Pemerintah...", 9.

²⁰ Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kementerian Agama, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama; Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, Dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006*, 1st ed. (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), v.

mampu mempertemukan keberagaman ini dengan adanya organisasi yang bernama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), di mana terdapat berbagai pemikir dari agama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Hal ini tentunya sangat baik, karena akan menimbulkan kesan bahwa kita bisa hidup damai meskipun dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Dengan adanya pertemuan seperti itu, hendaknya mampu membentuk sebuah budaya yang melahirkan sikap toleransi antarumat beragama berupa saling menghormati antarkepentingan dan dapat hidup berdampingan dalam komunitas masyarakat madani.²¹

Membumikan moderasi beragama sebagai bentuk pencegahan konflik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Kota Makassar, salah satunya ialah peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral pada tahun 2020 merupakan aksi teror yang mengatasnamakan *jihad*. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi terkait moderasi beragama sebagai penguatan keimanan di empat belas kecamatan, salah satunya kecamatan Mariso, pada tanggal 7 September 2022.²²

D. PENUTUP

Terdapat beragam bentuk inisiatif advokasi dan dialog antaragama yang telah diimplementasikan para pegiat perdamaian dan tokoh agama di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, memiliki pendekatan yang berbeda-beda, di antaranya ialah pendekatan formal dengan basis antarorganisasi dan instansi, seperti penyelenggaraan dan pertemuan para tokoh antaragama dan keyakinan, seminar dan diskusi akademik di kampus-kampus, paguyuban pemuda lintas agama, hingga mediasi antarumat beragama dengan pihak pemerintah setempat. Selain kegiatan formal, praktik-praktik dialog antaragama yang dilakukan para pegiat perdamaian dan kerukunan antarumat beragama di Sulawesi Selatan, terutama pada Kota Makassar, juga dalam bentuk kegiatan yang bersifat informal, di antaranya, kunjungan ke tempat-tempat ibadah, seperti masjid, gereja, vihara, dan lain-lain.

Bentuk-bentuk advokasi dan dialog antaragama yang berupa kemah dan kampanye perdamaian, menjalin kerja sama dengan pemerintah setempat untuk

²¹ Ramadhan, dalam Darwis Muhdina, "Peran Pemerintah..." 12.

²² Forum Kerukunan Umat Beragama, "Laporan Pertanggungjawaban Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun Anggaran 2020" (Makassar, 2020), 4.

memeringati hari perdamaian sedunia, juga terdapat upaya dalam membangun narasi melalui dunia *online* dengan menciptakan konten wacana mengenai isu perdamaian dan kerukunan. Pada level ini, tentu saja sasarannya merupakan para generasi muda, terutama kaum milenial dan generasi ‘z’ yang dalam sehari-harinya tidak lepas dari dunia *gadget*. Amanah Nurish menduga, masyarakat Sulawesi Selatan, utamanya masyarakat kota Makassar, telah membuktikan bahwa kesadaran akan berdialog dan beradvokasi dalam membangun literasi dapat menjadi sangat progresif, meskipun di sisi lain, intensitas konflik antaragama kerap terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Makassary, Ridwan, and Yusuf Daud, eds. *Menyalakan “Lilin”: Dialog Antar Agama*. Yogyakarta: Litera, 2020.
- Al-Munawwar, Said Agil Husin. *Fikih Hubungan Antar Agama*. 3rd ed. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Anjasari, Riya. “LAPAR Sulsel’s Action In Building Political Literacy In Makassar City Communities.” *Asian Journal of Social and Humanities* 1, no. 11 (2023): 765–76. <https://ajosh.org/index.php/jsh/article/view/98/130>.
- Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kementerian Agama. *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama; Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, Dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006*. 1st ed. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Forum Kerukunan Umat Beragama. “Laporan Pertanggungjawaban Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun Anggaran 2020.” Makassar, 2020.
- Hopkins, John. “‘A’ Frame for Advocacy,” 1999.
- Jubba, Hasse. *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual Di Indonesia*. The Phinisi Press, 2019.
- Lutfiana, Syifa Ainun, Kurniawati Kurniawati, R Wisnubroto, dan Reni Wulandari. “The Wahid Institute Dan Pluralisme Di Indonesia (2004-2008).” *Estoria: Journal of Social Science and Humanities* 2, no. 1 (2021): 209–25. <https://doi.org/10.30998/je.v2i1.600>.
- M. Pakatuwo, Laessach, Muhaemin Muhaemin, dan La Ode Ismail. “Merawat Pluralisme Dan Pendidikan Demokrasi Di Indonesia: Kontribusi Komunitas Gusdurian Di Kota Makassar.” *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2, no. 2 (October 31, 2023): 98–119. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v2i2.63>.
- Mantu, Rahman. “Lembaga Interfaith Di Indonesia (Studi Kritis Pendekatan Formalistik Negara Terhadap Kerukunan Antarumat Beragama).” *Aqlam*:

Journal of Islam and Plurality 1, no. 1 (2016): 53–64.

- Muhdina, Darwis. “Peran Pemerintah Terhadap Kerukunan Umat Beragama Di Kota Makassar.” *Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2018): 1–14.
- Rahim, Nur Rahmi. “Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama Di Kota Makassar.” UIN Alauddin Makassar, 2023. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/25153/>.
- Santalia, Indo dan Irwanto. “Peace Building : Studi Kasus Kegiatan Mahabbah Institute For Peace And Goodness Di Kota Makassar.” *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial Dan Agama* 5, no. 2 (2018): 235–94. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adyan/article/view/10021>.
- Syam, Muhammad Arief. “IMPLEMENTATION OF ARTICLES OF HARMONY BETWEEN RELIGIOUS PEOPLE AT MAHABBAH INSTITUTE FOR PEACE AND GOODNESS.” *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 11, no. 2 (2022): 228–45. <https://doi.org/10.24252/jicsa.v11i2.33146>.
- Wiryan, Danang, Rini Riyantini, dan Lusia Handayani. “Komunikasi Advokasi Klarifikasi Fakta Pemberitaan Hoaks Pada Instagram @JALAHOAKS.” *Jurnal Pustaka Komunikasi* 4, no. 2 (2021): 198–211.